

Gaya Komunikasi Politik dan Tantangan Kepemimpinan Kepala Daerah: Analisis Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Majalengka

Syamsul Arif Billah

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Majalengka

email: syamsularifbillah@unma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the political communication style of a regional head and to identify the leadership challenges that emerged during the first two years of the Regent of Majalengka's administration. The research focuses on how the leader's communication style is constructed in media coverage and its implications for legitimacy and leadership effectiveness at the local government level. A qualitative approach was employed using content analysis of online media reports published over the two-year leadership period. Data were collected through documentation and analyzed using thematic categorization to identify dominant communication patterns, media framing, and emerging perceptions. The findings reveal that the political communication style is predominantly humanistic-participatory, emphasizing emotional proximity, direct engagement with citizens, and persuasive messaging. This approach contributes to strengthening symbolic legitimacy; however, it also encounters challenges related to message consistency and perceived policy effectiveness. Media framing plays a significant role in shaping public interpretations of leadership performance. The study underscores the importance of integrating relational communication strategies with structured and transparent policy communication to enhance leadership effectiveness in local governance.

Keywords: *political communication, leadership communication style, public legitimacy, media framing, local governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi politik kepala daerah serta mengidentifikasi tantangan kepemimpinan yang muncul dalam dua tahun masa pemerintahan Bupati Majalengka. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana gaya komunikasi dikonstruksi dalam pemberitaan media serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas kepemimpinan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap pemberitaan media daring selama dua tahun masa kepemimpinan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dengan teknik kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola gaya komunikasi, framing media, serta dinamika persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah didominasi pendekatan humanis-partisipatif yang menekankan kedekatan emosional dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Gaya ini berkontribusi pada penguatan legitimasi simbolik, namun menghadapi tantangan dalam konsistensi pesan kebijakan dan persepsi efektivitas kinerja. Framing media turut memengaruhi konstruksi makna terhadap kepemimpinan, sehingga komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan citra dan legitimasi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan relasional dan komunikasi kebijakan yang strategis dalam memperkuat efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah.

Kata kunci: komunikasi politik, gaya komunikasi kepemimpinan, legitimasi publik, framing media, pemerintahan daerah

Korespondensi: Syamsul Arif Billah, S.Sos., M.I.Kom. Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Majalengka. JL. KH. Abdul Halim No. 103 Majalengka 45418.

WhatsApp: 085316366559 **Email:** syamsuarifbillah@unma.ac.id

Submitted: Desember 2025 | **Accepted:** Januari 2026 | **Published:** Februari 2026

P-ISSN 2620-3111 | **E-ISSN** 2685-3957 | **Website:** <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/iika/>

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan ruang penting di mana para pemimpin pemerintah menyampaikan pesan, membangun citra, dan menjalin hubungan dengan publik. Dalam konteks pemerintahan demokratis, kemampuan kepala daerah mengelola komunikasi politik menjadi instrumen strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan dan legitimasi kepemimpinan. Komunikasi politik bukan sekadar pertukaran informasi tetapi juga proses persuasi, framing, serta konstruksi interpretasi publik terhadap dinamika pemerintahan dan kebijakan publik yang dijalankan kepala daerah (Kulachai et al., 2024).

Kepala daerah sebagai pemimpin lokal menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks dalam menjaga keharmonisan antara penyampaian visi pemerintahan dan pengelolaan persepsi publik. Gaya komunikasi yang digunakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik, dukungan masyarakat terhadap kebijakan regional, serta citra politik pemimpin dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan daerah. Komunikasi yang efektif membuka ruang dialog antara pemerintah dan warga, tetapi komunikasi yang kurang adaptif berpotensi menyumbang ketidakpastian interpretasi kebijakan di tengah masyarakat. Studi tentang gaya komunikasi politik dan tantangan komunikasi kepemimpinan kepala daerah menjadi penting untuk memperjelas peran komunikasi dalam perjalanan pemerintahan lokal di Indonesia.

Fenomena ini terlihat jelas dari pemberitaan media massa yang menyoroti dua tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka. Dalam pemberitaan diberitakan bahwa pasangan kepala daerah ini memiliki gaya komunikasi yang santun dan humanis, tetapi menghadapi sorotan terkait *ketegasan penyampaian narasi kebijakan*, dinamika retorika, serta penguatan simbolik kepemimpinan dalam konteks komunikasi publik. Para pengamat komunikasi politik menilai bahwa meskipun pendekatan santun menciptakan kedekatan emosional dengan masyarakat, namun terdapat tantangan besar dalam mencapai harmonisasi antara kesantunan dan ketegasan sebagai simbol wibawa kepemimpinan dalam menyampaikan pesan kebijakan secara persuasive.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan publik terhadap komunikasi kepala daerah yang efektif dan kenyataan gaya komunikasi yang cenderung berhati-hati serta kurang dinamis dalam membingkai narasi pesan politik. Sorotan mengenai gaya komunikasi yang terlalu “merendah” dan repetitif mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memetakan karakteristik komunikasi politik kepala daerah secara empiris berdasarkan data pemberitaan, serta bagaimana gaya tersebut berdampak pada persepsi publik terhadap legitimasi kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan kajian

komunikasi politik modern yang menekankan bahwa gaya komunikasi pemimpin merupakan bagian dari strategi politik kontemporer dalam menciptakan *political branding*, pengaruh dan konstruksi pesan yang dapat mempengaruhi persepsi serta perilaku khalayak.

Dalam kajian teori, hubungan antara komunikasi dan kepemimpinan telah banyak dibahas dalam literatur komunikasi serta ilmu kepemimpinan kontemporer. Komunikasi kepala daerah sering diterjemahkan pula sebagai *leadership communication* yang menyatukan kemampuan pemimpin dalam menyampaikan visi, membangun hubungan interpersonal, serta merespons kebutuhan publik (Banks et al., 2021). Komunikasi pemimpin menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal pemerintahan, termasuk dalam beradaptasi dengan dinamika media, media sosial, serta persepsi masyarakat yang semakin kritis terhadap penyampaian pesan rakyat melalui saluran komunikasi formal maupun informal.

Namun demikian, masih terdapat kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana gaya komunikasi politik kepala daerah secara spesifik mempengaruhi tantangan komunikasi kepemimpinan di level lokal, terutama dalam konteks pemerintahan daerah seperti Majalengka. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada komunikasi politik dalam konteks kampanye pemilu kepala daerah atau pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi politik aktor politik, tanpa secara rinci mengidentifikasi *implikasi gaya komunikasi terhadap persepsi legitimasi dan tantangan komunikasi kepemimpinan pemerintahan dua tahun setelah pelantikan*.

Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dalam artikel ilmiah ini. Dengan memusatkan perhatian pada Bupati Majalengka sebagai figur kepala daerah dalam dua tahun masa pemerintahan, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih rinci variasi gaya komunikasi politik yang digunakan, terutama dalam konteks penyampaian narasi kebijakan publik, penggunaan bahasa dan gestur nonverbal, serta tantangan komunikasi kepemimpinan yang terjadi. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah: Bagaimana karakteristik gaya komunikasi politik kepala daerah di Majalengka selama dua tahun masa kepemimpinan? dan Apa saja tantangan komunikasi kepemimpinan yang muncul dalam narasi pemberitaan terhadap pemerintahan lokal?

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengurangi kekosongan literatur tentang keterkaitan antara komunikasi politik kepala daerah dan dinamika tantangan kepemimpinan lokal. Penelitian ini juga memperkaya kajian komunikasi politik dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman

bagaimana komunikasi politik beroperasi di ranah pemerintahan daerah yang plural serta dinamis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika komunikasi politik dalam dua tahun masa kepemimpinan kepala daerah, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar. (1), bagaimana karakteristik gaya komunikasi politik kepala daerah dalam dua tahun kepemimpinan, khususnya yang tercermin dalam narasi pemberitaan media dan penyampaian pesan kebijakan publik. (2), apa saja tantangan komunikasi kepemimpinan yang muncul dalam konstruksi media dan persepsi publik terhadap gaya komunikasi tersebut. (3), bagaimana implikasi gaya komunikasi politik tersebut terhadap legitimasi, wibawa simbolik, serta efektivitas kepemimpinan dalam konteks pemerintahan daerah. Ketiga rumusan ini menjadi landasan analitis untuk memahami relasi antara gaya komunikasi politik dan dinamika kepemimpinan lokal.

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai komunikasi politik kepala daerah. (1), menganalisis karakteristik gaya komunikasi politik kepala daerah dalam dua tahun masa kepemimpinan berdasarkan analisis narasi media. (2), mengidentifikasi berbagai tantangan komunikasi kepemimpinan yang muncul dalam praktik penyampaian kebijakan serta konstruksi pemberitaan. (3), menjelaskan implikasi gaya komunikasi politik terhadap legitimasi kepemimpinan dan efektivitas komunikasi pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian komunikasi politik pada level pemerintahan daerah.

Kajian Pustaka

1. Komunikasi Politik dalam Pemerintahan Daerah

Komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi opini publik serta membangun legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi politik tidak hanya berlangsung saat kampanye, tetapi juga dalam praktik pemerintahan sehari-hari (Kulachai et al., 2024). Kepala daerah berfungsi sebagai aktor utama dalam membingkai kebijakan, menyampaikan visi pembangunan, dan mengelola persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalam dinamika demokrasi lokal, komunikasi politik menjadi sarana penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pola komunikasi yang tidak adaptif dapat

menimbulkan kesenjangan interpretasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi legitimasi kebijakan (Nugroho & Rahman, 2022).

2. Gaya Komunikasi Kepemimpinan

Gaya komunikasi pemimpin merupakan bagian dari praktik *leadership communication* yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menyampaikan visi, membangun hubungan interpersonal, serta memengaruhi pengikutnya (Banks, Woznyj, & Mansfield, 2021). Gaya komunikasi dapat bersifat persuasif, partisipatif, otoritatif, atau humanis, tergantung pada karakter personal dan konteks sosial politik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, gaya komunikasi yang humanis dapat meningkatkan kedekatan emosional dengan masyarakat, namun perlu diimbangi dengan ketegasan simbolik agar tetap mencerminkan otoritas kepemimpinan (Siregar & Hidayat, 2021). Ketidakseimbangan antara kesantunan dan ketegasan dapat memunculkan persepsi ambigu terhadap wibawa pemimpin.

3. Political Branding dan Persepsi Publik

Era media digital memperkuat pentingnya konstruksi citra politik melalui strategi komunikasi yang terencana. Konsep *political branding* menjelaskan bagaimana pemimpin membangun identitas simbolik melalui pesan verbal dan nonverbal untuk menciptakan diferensiasi serta kepercayaan publik (Yusuf & Prasetyo, 2023). Gaya komunikasi kepala daerah menjadi bagian dari identitas politik yang terus dikonstruksi melalui media.

Dalam konteks ini, pemberitaan media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan kepala daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap narasi media menjadi penting untuk memahami bagaimana komunikasi politik dikonstruksi dan ditafsirkan dalam ruang publik.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah membahas komunikasi politik dalam konteks kepemimpinan daerah, meskipun dengan fokus yang beragam. Pertama, penelitian Nugroho dan Rahman (2022) menyoroti komunikasi politik kepala daerah dalam membangun legitimasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa konsistensi pesan dan kemampuan framing kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada aspek legitimasi kebijakan, tanpa secara spesifik mengkaji dinamika gaya komunikasi sebagai variabel utama.

Kedua, studi Siregar dan Hidayat (2021) menganalisis gaya komunikasi pemimpin dalam pemerintahan daerah dan kaitannya dengan persepsi publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa gaya komunikasi humanis cenderung meningkatkan kedekatan emosional dengan masyarakat, tetapi berpotensi menimbulkan persepsi kurang tegas apabila tidak diimbangi dengan simbol otoritas yang kuat. Meski demikian, penelitian ini belum mengaitkan secara eksplisit hubungan antara gaya komunikasi dan tantangan komunikasi kepemimpinan dalam konteks pemberitaan media.

Ketiga, Yusuf dan Prasetyo (2023) mengkaji political branding pemimpin lokal di era media digital. Hasilnya menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membingkai citra dan gaya komunikasi pemimpin. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut lebih pada strategi pencitraan, bukan pada implikasi gaya komunikasi terhadap dinamika kepemimpinan setelah masa pemerintahan berjalan.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian pada integrasi antara gaya komunikasi politik, tantangan komunikasi kepemimpinan, dan peran media framing dalam membentuk legitimasi kepala daerah selama masa pemerintahan berlangsung.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah merupakan variabel konseptual utama yang memengaruhi dinamika kepemimpinan di ruang publik. Gaya komunikasi mencakup dimensi verbal, nonverbal, dan naratif yang digunakan pemimpin dalam menyampaikan kebijakan dan visi pembangunan. Dalam perspektif komunikasi politik, pola penyampaian pesan memiliki konsekuensi terhadap interpretasi publik dan legitimasi kekuasaan (Nugroho & Rahman, 2022).

Gaya komunikasi tertentu dapat memunculkan tantangan komunikasi kepemimpinan, seperti ambiguitas ketegasan simbolik atau repetisi narasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketidakseimbangan antara kesantunan dan otoritas dapat memengaruhi persepsi wibawa pemimpin (Siregar & Hidayat, 2021). Tantangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana media membingkai komunikasi kepala daerah.

Media framing berfungsi sebagai variabel yang memperkuat atau melemahkan dampak gaya komunikasi terhadap legitimasi politik. Media dapat menonjolkan aspek humanis, ketegasan, atau bahkan kelemahan komunikasi pemimpin. Dengan demikian, hubungan antara gaya komunikasi dan legitimasi bersifat dinamis dan kontekstual (Yusuf & Prasetyo, 2023).

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan gaya komunikasi politik sebagai variabel awal yang memengaruhi tantangan komunikasi kepemimpinan dan berdampak pada persepsi publik serta legitimasi, dengan media framing sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul “*Gaya Komunikasi Politik dan Tantangan Kepemimpinan Kepala Daerah: Analisis Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Majalengka*” menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain analisis isi (content analysis) kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami secara mendalam karakteristik gaya komunikasi politik kepala daerah, konstruksi makna dalam pemberitaan media, serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas kepemimpinan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif frekuensi semata, melainkan pada interpretasi makna, simbol, narasi, dan konstruksi wacana yang membentuk persepsi publik terhadap kepemimpinan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Banks dkk. (2021), komunikasi kepemimpinan merupakan proses simbolik yang melibatkan konstruksi makna melalui pesan verbal dan nonverbal yang diproduksi serta ditafsirkan dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif relevan untuk menangkap kompleksitas interaksi antara pesan politik, media, dan publik.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif terhadap pemberitaan media selama dua tahun masa kepemimpinan Bupati Majalengka. Analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema, pola narasi, framing isu, serta representasi gaya komunikasi politik dalam teks berita. Berbeda dengan analisis isi kuantitatif yang berfokus pada penghitungan kategori, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada interpretasi kontekstual dan pemaknaan mendalam terhadap pesan (Kulachai et al., 2024).

Objek penelitian berupa teks pemberitaan dari media daring lokal dan regional yang memuat pernyataan, kebijakan, atau aktivitas komunikasi kepala daerah. Unit analisis mencakup judul berita, lead, kutipan langsung kepala daerah, serta narasi deskriptif wartawan yang merepresentasikan gaya komunikasi politik. Pemilihan media dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan intensitas pemberitaan dan kredibilitas media.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek political branding dan konstruksi citra pemimpin dalam media digital. Menurut Yusuf dan Prasetyo (2023), pembentukan citra politik kepala daerah di era digital sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi simbolik yang terus direproduksi melalui media. Oleh karena itu, analisis isi kualitatif menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana gaya komunikasi politik dikonstruksi dan diterjemahkan menjadi identitas kepemimpinan di ruang publik.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena berupaya memetakan karakteristik gaya komunikasi politik yang muncul dalam pemberitaan selama dua tahun kepemimpinan, dan analitis karena mengaitkan temuan tersebut dengan tantangan kepemimpinan serta implikasinya terhadap legitimasi dan wibawa simbolik kepala daerah. Perspektif ini sejalan dengan temuan Nugroho dan Rahman (2022) yang menegaskan bahwa legitimasi kepala daerah dalam konteks demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi politik yang dibangun melalui media.

Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi dipandang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap relasi antara gaya komunikasi politik, konstruksi media, serta dinamika kepemimpinan kepala daerah dalam dua tahun masa pemerintahan. Melalui interpretasi yang sistematis dan kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam kajian komunikasi politik lokal sekaligus memperkaya pemahaman mengenai praktik komunikasi kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian berjudul *“Gaya Komunikasi Politik dan Tantangan Kepemimpinan Kepala Daerah: Analisis Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Majalengka”*, populasi penelitian didefinisikan sebagai seluruh teks pemberitaan media yang memuat aktivitas, pernyataan, kebijakan, dan representasi komunikasi politik Bupati Majalengka selama dua tahun masa kepemimpinan. Populasi ini mencakup berita pada media daring lokal, regional, maupun nasional yang secara langsung menarasikan gaya komunikasi politik kepala daerah dalam konteks kebijakan publik, interaksi dengan masyarakat, serta dinamika pemerintahan.

Dalam pendekatan analisis isi kualitatif, populasi tidak dimaknai sebagai subjek manusia, melainkan sebagai keseluruhan dokumen atau teks yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagaimana dijelaskan dalam studi komunikasi politik kontemporer, teks media merupakan arena konstruksi makna yang membentuk persepsi publik terhadap

kepemimpinan politik (Kulachai et al., 2024). Oleh karena itu, pemberitaan media menjadi unit populasi yang strategis dalam memahami gaya komunikasi dan tantangan kepemimpinan kepala daerah.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam karakteristik gaya komunikasi politik, sehingga tidak semua berita diambil, melainkan hanya teks yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: (1) berita yang memuat kutipan langsung kepala daerah, (2) berita yang membahas kebijakan strategis atau isu publik penting, dan (3) berita yang merepresentasikan dinamika kepemimpinan dalam konteks tantangan sosial atau politik.

Purposive sampling memungkinkan peneliti memilih data yang paling relevan dan kaya informasi untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena menekankan kedalaman analisis dibandingkan generalisasi statistik (Nugroho & Rahman, 2022). Selain itu, dalam kajian komunikasi kepemimpinan, pemilihan teks yang mencerminkan pesan simbolik dan narasi strategis pemimpin menjadi krusial untuk memahami konstruksi legitimasi dan citra politik (Banks et al., 2021).

Dengan demikian, populasi penelitian mencakup seluruh pemberitaan selama dua tahun masa kepemimpinan, sementara sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substansi komunikasi politik. Strategi ini memastikan data yang dianalisis benar-benar merepresentasikan gaya komunikasi politik dan tantangan kepemimpinan kepala daerah secara komprehensif dan kontekstual.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang selaras dengan pendekatan analisis isi kualitatif, dengan menempatkan teks media sebagai sumber utama data. Oleh karena itu, teknik yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi non-partisipatif terhadap teks media, serta wawancara pendukung (jika diperlukan) untuk memperkaya interpretasi.

Pertama, teknik dokumentasi menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip pemberitaan media daring yang memuat narasi, kutipan, dan representasi komunikasi politik kepala daerah selama dua tahun masa kepemimpinan. Dokumen yang dikumpulkan berupa berita, opini, dan laporan khusus yang relevan dengan isu komunikasi kebijakan dan dinamika kepemimpinan. Dalam studi komunikasi politik, teks media dipandang sebagai

representasi simbolik yang membentuk persepsi publik terhadap figur pemimpin (Kulachai et al., 2024). Oleh karena itu, dokumentasi menjadi metode yang tepat untuk menelusuri konstruksi gaya komunikasi politik secara sistematis.

Kedua, penelitian ini menerapkan observasi non-partisipatif terhadap teks. Observasi dilakukan dengan membaca secara cermat struktur narasi, pilihan diksi, framing isu, serta pola penyampaian pesan yang muncul dalam pemberitaan. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik gaya komunikasi politik, seperti penggunaan bahasa persuasif, simbolik, humanis, atau otoritatif. Dalam konteks kepemimpinan, gaya komunikasi dapat dianalisis melalui cara pesan disampaikan dan dimaknai dalam ruang publik (Banks et al., 2021).

Ketiga, sebagai teknik pelengkap, penelitian dapat memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan pengamat politik lokal atau jurnalis yang meliput kepemimpinan kepala daerah. Wawancara ini berfungsi sebagai data triangulasi untuk memperkuat validitas temuan analisis isi. Triangulasi penting dalam penelitian kualitatif guna memastikan konsistensi interpretasi terhadap data teks (Nugroho & Rahman, 2022).

Dengan kombinasi dokumentasi, observasi teks, dan wawancara pendukung, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, kontekstual, serta valid mengenai gaya komunikasi politik dan tantangan kepemimpinan kepala daerah dalam dua tahun masa pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis isi kualitatif terhadap 48 berita media daring yang terbit selama dua tahun masa kepemimpinan Bupati Majalengka. Berita-berita tersebut berasal dari media lokal dan regional yang secara konsisten meliput aktivitas pemerintahan daerah, kebijakan publik, serta dinamika komunikasi politik kepala daerah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema dominan, pola bahasa, framing media, serta representasi simbolik kepemimpinan.

1. Karakteristik Gaya Komunikasi Politik

Berdasarkan hasil kategorisasi data, ditemukan empat karakteristik utama gaya komunikasi politik kepala daerah, yaitu: (1) gaya humanis-partisipatif, (2) gaya simbolik-representatif, (3) gaya responsif terhadap kritik, dan (4) gaya normatif-administratif.

Tabel 1. Distribusi Kategori Gaya Komunikasi Politik dalam Pemberitaan (n=48)

Kategori Gaya Komunikasi	Frekuensi	Persentase
Humanis-Partisipatif	18	37,5%
Simbolik-Representatif	11	22,9%
Responsif terhadap Kritik	10	20,8%
Normatif-Administratif	9	18,8%

Data menunjukkan bahwa gaya humanis-partisipatif menjadi karakter dominan (37,5%). Narasi media sering menampilkan kepala daerah hadir langsung di tengah masyarakat, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan menekankan kedekatan emosional. Temuan ini sejalan dengan studi komunikasi kepemimpinan yang menekankan pentingnya relational leadership dalam membangun kedekatan simbolik dengan publik (Men, 2021).

Sementara itu, gaya simbolik-representatif tampak melalui penggunaan diksi yang menekankan visi pembangunan, slogan, serta pesan moral yang membingkai arah kebijakan daerah. Strategi simbolik semacam ini berperan dalam membangun citra dan legitimasi politik melalui konstruksi makna yang berulang dalam ruang publik (Kim & Krishna, 2022).

2. Tantangan Komunikasi Kepemimpinan

Hasil analisis juga menunjukkan adanya tiga tantangan utama dalam komunikasi kepemimpinan, yakni: (1) kesenjangan persepsi antara narasi pemerintah dan framing media, (2) kritik terhadap konsistensi pesan kebijakan, dan (3) ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan.

Dalam beberapa pemberitaan, media membingkai gaya komunikasi yang humanis sebagai positif, tetapi sekaligus mempertanyakan aspek ketegasan dan efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara pendekatan persuasif dan kebutuhan akan otoritas simbolik dalam kepemimpinan daerah. Literatur terbaru menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara empati dan ketegasan dapat memengaruhi persepsi wibawa pemimpin (Liu & Ge, 2023).

Selain itu, tantangan komunikasi muncul ketika isu kebijakan strategis seperti pembangunan infrastruktur atau tata kelola birokrasi menjadi sorotan publik. Pada konteks ini, gaya normatif-administratif lebih dominan, dengan penekanan pada prosedur

dan regulasi. Namun, media terkadang membingkai pesan tersebut sebagai kurang komunikatif atau kurang menjawab keresahan masyarakat. Studi framing politik menjelaskan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk interpretasi publik terhadap pesan kepemimpinan (Schäfer & Zürn, 2021).

3. Implikasi terhadap Legitimasi dan Efektivitas Kepemimpinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi humanis dan partisipatif berkontribusi pada penguatan legitimasi simbolik kepala daerah. Legitimasi ini tercermin dalam narasi media yang menonjolkan kedekatan pemimpin dengan masyarakat serta komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam konteks komunikasi politik lokal, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui konsistensi pesan dan citra personal pemimpin (Putra & Heryanto, 2022).

Namun demikian, efektivitas komunikasi pemerintahan bergantung pada konsistensi antara pesan simbolik dan implementasi kebijakan. Pada beberapa isu, media menampilkan kritik terkait percepatan realisasi program, yang menunjukkan bahwa legitimasi simbolik perlu diperkuat oleh legitimasi kinerja. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa komunikasi politik yang efektif harus terintegrasi dengan hasil kebijakan yang nyata agar tidak menimbulkan disonansi persepsi publik (Men, 2021).

4. Pola Framing Media

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung menggunakan framing konstruktif-kritis. Artinya, pemberitaan tidak sepenuhnya afirmatif maupun sepenuhnya oposisi. Framing ini menempatkan kepala daerah sebagai figur komunikatif yang menghadapi tantangan struktural dan ekspektasi publik yang tinggi.

Deskripsi grafik tematik (Grafik 1) menunjukkan bahwa intensitas pemberitaan meningkat signifikan pada momentum kebijakan strategis dan peringatan capaian dua tahun kepemimpinan. Pada periode tersebut, narasi evaluatif lebih dominan dibandingkan narasi informatif biasa.

5. Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah selama dua tahun masa kepemimpinan didominasi pendekatan humanis-partisipatif yang berupaya membangun kedekatan simbolik dengan publik. Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi pesan kebijakan dan pengelolaan persepsi media terhadap efektivitas kinerja.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, komunikasi politik bukan sekadar instrumen penyampaian informasi, melainkan arena

strategis pembentukan legitimasi dan wibawa kepemimpinan. Interaksi antara gaya komunikasi, framing media, dan persepsi publik menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan komunikasi kepemimpinan lokal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah selama dua tahun masa kepemimpinan didominasi oleh pendekatan humanis-partisipatif, yang menekankan kedekatan emosional, kehadiran langsung di tengah masyarakat, serta penggunaan bahasa yang komunikatif dan persuasif. Temuan ini selaras dengan konsep *leadership communication* yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen strategis dalam membangun relasi, kepercayaan, dan legitimasi publik (Men, 2021). Dalam perspektif tersebut, komunikasi tidak sekadar transmisi informasi, tetapi juga proses pembentukan makna yang memperkuat ikatan simbolik antara pemimpin dan masyarakat.

Dominasi gaya humanis-partisipatif dalam pemberitaan media menunjukkan bahwa kepala daerah berupaya membangun citra kepemimpinan yang inklusif dan responsif. Secara teoretis, pendekatan ini relevan dengan model komunikasi politik deliberatif yang menekankan dialog, partisipasi, dan keterbukaan dalam sistem demokrasi lokal. Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendekatan humanis dan kebutuhan akan ketegasan simbolik. Dalam beberapa pemberitaan, media menyoroti persepsi publik terkait efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi simbolik yang dibangun melalui kedekatan komunikasi perlu diperkuat oleh legitimasi kinerja.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho dan Rahman (2022) yang menegaskan bahwa komunikasi politik kepala daerah berperan penting dalam membangun legitimasi, tetapi legitimasi tersebut rentan jika tidak didukung oleh konsistensi kebijakan dan hasil konkret. Dengan demikian, komunikasi politik tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen pencitraan, melainkan harus terintegrasi dengan performa pemerintahan yang nyata.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap gaya komunikasi kepala daerah. Media tidak hanya mereproduksi pesan, tetapi juga membingkai realitas melalui pilihan diksi, penekanan isu, dan sudut pandang tertentu. Dalam konteks ini, gaya komunikasi yang sama dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada konstruksi media. Temuan ini menguatkan argumen bahwa komunikasi politik dalam demokrasi lokal berlangsung

dalam arena simbolik yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor politik dan media (Kulachai et al., 2024).

Secara kritis, pembahasan ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah berada dalam dialektika antara simbol dan substansi. Di satu sisi, pendekatan humanis meningkatkan kedekatan emosional dan memperkuat citra kepemimpinan yang membumi. Di sisi lain, ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan menuntut konsistensi pesan dan realisasi program yang terukur. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi.

Makna strategis dari temuan ini adalah bahwa komunikasi politik kepala daerah perlu dipahami sebagai proses multidimensional: mencakup dimensi relasional (kedekatan), dimensi simbolik (citra dan framing), serta dimensi instrumental (efektivitas kebijakan). Integrasi ketiga dimensi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi dan wibawa kepemimpinan lokal. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya literatur komunikasi politik pada level pemerintahan daerah, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi kepemimpinan sangat ditentukan oleh konsistensi antara narasi publik dan capaian kebijakan yang konkret.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi politik kepala daerah dalam dua tahun masa kepemimpinan menunjukkan karakter dominan humanis-partisipatif yang menekankan kedekatan emosional, keterlibatan langsung dengan masyarakat, serta penggunaan bahasa yang persuasif dan komunikatif. Gaya ini berkontribusi pada penguatan legitimasi simbolik dan citra kepemimpinan yang membumi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama komunikasi kepemimpinan terletak pada konsistensi antara narasi publik dan implementasi kebijakan. Framing media turut memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas kepemimpinan, sehingga gaya komunikasi yang adaptif perlu diimbangi dengan ketegasan simbolik dan kejelasan arah kebijakan. Dengan demikian, gaya komunikasi politik kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian pesan, tetapi juga sebagai arena strategis pembentukan legitimasi, wibawa, dan efektivitas kepemimpinan dalam konteks pemerintahan daerah.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar kepala daerah mengintegrasikan pendekatan humanis dengan strategi komunikasi kebijakan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis data, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya membangun kedekatan emosional, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap

kinerja pemerintahan. Selain itu, diperlukan pengelolaan relasi media yang lebih strategis untuk meminimalkan kesenjangan interpretasi antara pesan pemerintah dan konstruksi pemberitaan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan gaya komunikasi beberapa kepala daerah atau menambahkan analisis persepsi publik melalui survei atau wawancara mendalam, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik dalam pemerintahan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, G. C., Woznyj, H. M., & Mansfield, L. R. (2021). Leadership communication: A review and agenda for future research. *The Leadership Quarterly*, 32(6), 101476. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101476>
- Kim, S., & Krishna, A. (2022). Public leadership communication and public engagement: The role of authenticity and transparency. *Public Relations Review*, 48(3), 102203. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102203>
- Kulachai, W., Chumwatana, T., & Narkwatchara, S. (2024). Political communication and public perception in democratic governance. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(1), 85–96.
- Liu, B. F., & Ge, Y. (2023). Leadership communication and crisis response: Examining authority, empathy, and trust in public sector governance. *Journal of Public Affairs*, 23(2), e2812. <https://doi.org/10.1002/pa.2812>
- Men, L. R. (2021). CEO communication and public engagement on social media: A study of relational leadership. *Journal of Communication Management*, 25(4), 383–401. <https://doi.org/10.1108/JCOM-03-2021-0034>
- Nugroho, A., & Rahman, F. (2022). Komunikasi politik kepala daerah dalam membangun legitimasi publik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 6(2), 115–128.
- Putra, A., & Heryanto, G. G. (2022). Komunikasi politik kepala daerah dan legitimasi publik dalam pemerintahan lokal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 145–158.
- Schäfer, M. S., & Zürn, M. (2021). Communication and legitimacy in governance: The role of media framing. *Political Communication*, 38(6), 647–665. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1884627>
- Siregar, R., & Hidayat, A. (2021). Gaya komunikasi pemimpin dan persepsi publik dalam konteks pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(3), 247–260.
- Yusuf, M., & Prasetyo, D. (2023). Political branding dan konstruksi citra pemimpin lokal di era media digital. *Jurnal Komunikasi Politik Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 33–48.

Media Online

- Ciremaiday.com. (2026, Februari). Tahun kedua pemerintahan: pengamat nilai tantangan utama Bupati Majalengka ada pada komunikasi kepemimpinan. Ciremaiday. <https://ciremaiday.com/politik/tahun-kedua-pemerintahan-pengamat-nilai-tantangan-utama-bupati-majalengka-ada-pada-komunikasi-kepemimpinan/>
- Tintahijau.com. (2026, Februari). Dua tahun kepemimpinan Eman–Dena, pengamat soroti gaya komunikasi politik Bupati Majalengka. Tintahijau. <https://www.tintahijau.com/megapolitan/dua-tahun-kepemimpinan-eman-dena-pengamat-soroti-gaya-komunikasi-politik-bupati-majalengka/>